

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E, & Faninda, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Publika*, 1, 1-19. Diperoleh 27 November 2018, dari <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2533>
- Bastian, I. (2015) *Akuntansi Kecamatan dan Desa*. Jakarta : PT. Erlangga.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jibeka*, 10, 26-32. Diperoleh pada 27 November 2018, dari <http://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/4>
- Erlina, dkk. (2015) *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Faradhiba, L, & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *E_JRA*, 7, 14-24. Diperoleh pada 27 November 2018, dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/1428/1400>
- Faridah, & Suryono, B. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jira*, 1, 21-44. Diperoleh pada 27 November 2018, dari <http://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/817/77>
- Hoesada, J. (2016) *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Ibrahim. (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Indrianasari, T. N. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Padang). *Asset*, 1, 29 - 46. Diperoleh 27 November 2018, dari <https://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/asset/article/download/28/22>
- Kamaroesid, H. (2017) *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik/Penerapannya di Desa*. Edisi Pertama. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanasmawatie, I. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JAP*, 2, 597 - 602. Diperoleh 27 November 2018, dari <https://ejournal.ub.ac.id/index.php/jap/article>

- Mardiasmo, M.B.A., Ak. (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tentang Laporan Kepala Desa. (2016). Diperoleh 1 Desember 2018, dari www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Diperoleh 1 Desember 2018, dari www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (2014). Diperoleh 1 Desember 2018, dari www.jdih.kemenkeu.go.id
- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Edisi Pertama. Jakarta : Sinar Grafika
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Kompilek*, 7, 139-148. Diperoleh 27 November 2018, dari <http://journal.stiekan.ac.id/index.php/kompilek>
- Sistem Informasi Desa (SID). Diperoleh 10 April 2019, dari <http://kebonsari-yosowilangun.lumajangkab.go.id/index.php/>
- Suci, R. M. & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jira*, 1, 1-25. Diperoleh 27 November 2018, dari <http://ejurnal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/997>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Ketiga. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Yuliansyah, & Rusmiyanto. (2016). *Akuntansi Desa*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat